

**BAB III**  
**HUBUNGAN AUSTRALIA-INDONESIA**  
**MASA PEMERINTAHAN JOHN HOWARD**

**A. Masalah yang Menjadi Motif Australia Terhadap Indonesia**

*1. Keterlibatan Militer Australia di Timor-Timur*

Pemerintah dan rakyat Australia sangat menghargai tindakan cepat Indonesia untuk membantu yang menunjukkan kedalaman persahabatan antara Australia dan Indonesia, terutama saat terjadi bencana alam. Dua orang warga Indonesia yang juga menjadi korban bencana kebakaran hutan.<sup>1</sup> Kedaulatan bangsa untuk mempertahankan Timor-Timur dengan jalan militer dianggap Australia telah melanggar hak-hak penentuan nasib sendiri. Masyarakat Timor-Timur atas kedaulatan wilayahnya. Ketidaksenangan ini berakibat pada pelaporan kepada PBB, pencemaran nama baik Indonesia di dunia internasional.

Tentara PBB dari Australia merupakan pasukan tempur yang setiap waktu bisa melakukan tindakan. Kerja sama bilateral antara Angkatan Udara Australia dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia semakin dipererat dengan kunjungan persahabatan pesawat angkut Australia C-17A Globemaster ke Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Datang dengan pesawat itu, Komandan Angkatan Udara Australia John Oddie yang terlibat dalam operasi pemberian bantuan kemanusiaan pasca tsunami di Aceh dan gempa bumi di Sumatera Utara. Panglima Komando

---

<sup>1</sup> Z.A. Makarim. *Hari-hari Terakhir Timor Timur. Sebuah Kesaksian*. Jakarta: Sportif Media Informasindo. 2003. hlm. 19-24.

Operasi Angkatan Udara TNI Marsekal Muda Imam Sufaat saat berkunjung untuk melihat-lihat pesawat angkut C-17A itu, kerja sama Angkatan Udara Australia dan TNI AU sangat baik. Kita rutin mengirimkan untuk instruktur pilot di Australia.

Australia dan Indonesia mempunyai perbatasan maritim. Di samping itu, dua negeri tetangga khusus yang lain yaitu PNG dan Timor-Timur mempunyai perbatasan langsung dengan Indonesia.<sup>2</sup> Australia mengemban tanggung jawab atas keamanan PNG dan Timor-Timur. Semua fakta ini mempunyai potensi timbulnya konflik antara Australia dan Indonesia, baik secara langsung maupun melalui salah satu dari negeri ketiga tersebut.

Australia mempunyai perjanjian pertahanan dengan beberapa negara “sekutu” di daerah regional ini yaitu dengan Selandia Baru, Brunei, Malaysia dan Singapura. Pembentukan persekutuan tersebut untuk menghadapi ancaman komunisme, akhir-akhir ini logikanya dipakai untuk menghadapi terorisme. Sayangnya, baik ancaman komunisme maupun ancaman terorisme diasosiasikan dengan Indonesia sebagai salah satu sumber ancamannya. Jadi, sekali lagi sebagai negeri tetangga, Indonesia dipandang sebagai ‘ancaman’.

Menteri pertahanan Australia John Morore memberitahukan kepada negaranya bahwa akan melipatgandakan jumlah pasukan yang disiapkan untuk dikirim ke Timor-Timur sebagai pasukan perdamaian. Pada akhir Juni yaitu dari Angkatan Bersenjata Australia (ADF) sebanyak dua brigade (1.500 pasukan) yang

---

<sup>2</sup> *Kompas* 19 Oktober 2004, hlm. 3.

termasuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara, yang akan siap untuk dikirim untuk bertugas dalam waktu 28 hari.<sup>3</sup>

Australia mengatakan bahwa militer Australia hanya akan dikirim untuk bertugas di Timor-Timur di bawah bendera PBB. Beberapa negara Pasifik dan Eropa juga akan mengirimkan pasukan militernya. Jumlah pasukan PBB seluruhnya di Timor-Timur kira-kira akan mencapai 20.000 pasukan. Pasukan perdamaian Australia di pulau Bougainville terdapat 300 pasukan yang memakan biaya 60 juta dollar Australia.

Pasukan asing telah tiba di Timor-Timur yang dimaksudkan untuk membantu negara kecil tersebut yaitu untuk memulihkan keamanan, dikarenakan adanya pertempuran antara pasukan pemerintah dan mantan Tentara yang telah dipecat. 150 prajurit komando Australia telah mengamankan Bandara Dili. Situasi disekitar masih sangat tidak kondusif. Baku tembak terus terdengar disekitar kota. Jumlah korban tewas maupun terluka belum diketahui secara pasti. Baku tembak terjadi di Kantor Presiden Xanana Gusmao dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sejumlah gedung perkantoran dan perumahan hancur dibakar. Asap hitam terlihat diantara bangunan-bangunan kosong dan jalanan yang lengang. Warga local maupun asing segera meninggalkan Timor-Timur. Sukehiro Hasegawa, sebagai ketua Misi PBB di Timor-Timur mengkonfirmasi kepada pasukan Militer Timor-Timur

---

<sup>3</sup> *Kompas* 12 Maret 1999, hlm. 19.

telah menembaki polisi yang tidak bersenjata. Dalam kontak tembak tersebut sedikitnya ada 9 polisi yang tewas 27 luka-luka.<sup>4</sup>

Akibat situasi keamanan yang semakin tidak terkendali, Pemerintah Timor-Timur meminta bantuan kepada Pemerintah Australia, Selandia Baru, Portugal, dan Malaysia untuk mengirimkan pasukannya. Tentara Australia yang berjumlah 1.300 telah tiba dan langsung mengamankan Bandar udara. Pihak Malaysia mengirimkan 500 tentara, Selandia Baru mengirimkan 60 polisi, dan Portugal 120 polisi dan tentara.

Kekerasan yang terjadi di Timor-Timur terjadi ketika 591 tentara Angkatan Bersenjata Timor-Timur yang berjumlah 1.400 orang telah dipecat secara serentak. Tentara yang dipecat tersebut berasal dari wilayah barat banyak mengeluhkan sikap diskriminatif dari para komandan mereka yang berasal dari wilayah timur. Mereka juga mengeluhkan kondisi sehari-hari dan mereka juga sangat kekurangan gaji karena gaji yang diberikan sangat kecil. John howard juga mengirimkan bantuan militer lagi kepada pihak Timor-Timur tanpa syarat dan terdapat 1.300 tentara yang di kirimkan kepada Timor-Timur.

Indonesia dan Australia sebagai dua negara yang secara geografis bertetangga, tidak akan mungkin bisa mengelak untuk saling berhubungan. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang sangat unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga penuh dengan

---

<sup>4</sup> *Kompas* 26 Mei 2006, hlm. 1.

berbagai tantangan. Berbagai perbedaan menyolok diantara kedua negara dan bangsa bertetangga yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan perbedaan prioritas kepentingan menjadi penyebab utama hal ini terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan-perbedaan tersebut akan menciptakan berbagai masalah yang akan selalu mewarnai hubungan kedua negara di masa-masa mendatang.<sup>5</sup>

Selama ini, hubungan Australia-Indonesia mengalami pasang surut. Selain kerja sama di berbagai bidang antara lain ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan budaya yang mempererat hubungan dan kebersamaan, terdapat sejumlah masalah yang muncul dan mengganggu. Masalah-masalah yang kerap terjadi antara kedua negara ini telah membuahakan pandangan negatif orang banyak terhadap hubungan kedua negara ini.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa banyak sekali peristiwa yang terjadi pada masa yang lalu yang berpotensi menyebabkan konflik antara kedua negara ini. Marilah kita mencoba kembali sejenak melihat ke masa-masa yang silam, pada saat tahun 2005, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra mendapatkan teror kiriman paket berisi senyawa biologi. Paket ini dikirim melalui surat untuk Dubes Republik Indonesia di Australia dan diduga berisi bakteri berbahaya sejenis *anthrax*, dalam kasus Bom Bali. Kemudian pada tahun 2006 yang lalu, pemerintah Australia memberikan visa sementara kepada 42 pencari suaka asal Papua. Sebanyak 42 warga

---

<sup>5</sup> *Ibid*,

Papua meminta suaka pemerintah Australia karena merasa tidak aman tinggal di Indonesia. Padahal sebelumnya pemerintah Indonesia sudah menegaskan bahwa warga Papua tersebut tidak dalam keadaan terancam. Keputusan pemerintah Australia ini tidak menyenangkan bagi pemerintah Indonesia.

Bagi pemerintah Indonesia, hal ini merupakan reaksi ketidakpercayaan pemerintah Australia yang buntutnya merugikan pemerintah Indonesia dan juga memperburuk kondisi hubungan antar kedua negara, sehingga pada saat itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Hamzah Thayeb sempat diperintah untuk kembali ke Indonesia. Selain itu pada tahun 2006 pula, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilecehkan harian koran *The Australian* yang memuat kartun Presiden SBY sedang bersetubuh dengan warga Papua.<sup>6</sup>

Pada tahun 2008, banyak nelayan Indonesia asal Kupang yang berunjuk rasa didepan kantor DPRD mengecam sering terjadinya penangkapan terhadap nelayan Indonesia yang sedang menangkap ikan oleh pemerintah Australia, saling tuding terjadi antara kedua belah pihak semakin memperburuk keadaan hubungan bilateral kedua negara ini. Peristiwa-peristiwa ini tentunya akan semakin memperdalam jurang pemisah antara hubungan kedua negara ini untuk bisa saling bekerjasama dengan harmonis atas sesama negara tetangga. Namun, bagaimanapun juga hal ini merupakan hal yang biasa terjadi antara hubungan bertetangga dan persahabatan. Hampir sama jika kita analogikan dengan dua orang sahabat yang saling bertetangga satu dengan yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 45-48

lain, terkadang terjadi kesalahpahaman antara keduanya karena sesuatu hal. Adalah naif, jika ada yang berpendapat bahwa pada suatu titik hubungan kedua negara ini akan tercipta sedemikian rupa baiknya, sehingga terbebas dari masalah. Peristiwa-peristiwa di atas adalah data empiris yang menunjukkan bahwa hubungan kedua negara memiliki kecenderungan yang sangat fluktuatif, sehingga para pemimpin serta masyarakat kedua negara dituntut untuk selalu siap dengan berbagai solusi menghadapi setiap masalah yang muncul.<sup>7</sup>

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard, hubungan antara Indonesia dan Australia memang banyak menuai peristiwa yang tidak menyenangkan dan dapat merugikan kedua belah pihak, tetapi di lain sisi banyak juga hal positif yang dapat dilihat atas hasil kerjasama yang telah dilakukan oleh kedua negara ini. Terlepas dari masalah-masalah yang mengandung potensi konflik di atas,

Hubungan antara Australia-Indonesia dalam berbagai bidang tergolong tinggi, seperti dalam bidang pendidikan, budaya, dan perdagangan. Hal tersebut merupakan aset penting dalam hubungan kedua negara yang perlu terus dipupuk dan dikembangkan, sehingga diharapkan akan memainkan peran penting dalam peningkatan hubungan kedua negara. Upaya bersama Indonesia dan Australia untuk saling tukar para pemimpin akar rumput, termasuk para pemimpin agama, telah dirintis beberapa tahun terakhir ini. Prakarsa untuk menyelenggarakan '*interfaith dialogue*' yang melibatkan para pemimpin agama negara-negara ASEAN, Australia,

---

<sup>7</sup> Richard Robirson. *Indonesia: The Rise of Capital*. Sydney. 1986, hlm 56.

New Zealand, Papua Nugini, dan Timor-Timur merupakan salah-satu contoh konkrit untuk membina saling pengertian diantara bangsa seraya memberdayakan kalangan moderat di seluruh agama yang terlibat di dalam dialog tersebut.

Pada tahun 2004, di sektor pendidikan, terdapat sekitar 25.000 mahasiswa Indonesia yang saat ini belajar di Australia dan sebagian diantaranya adalah penerima beasiswa Pemerintah Australia, melalui AusAID. Mahasiswa Indonesia non-AusAID menyumbang sekitar 750 juta A\$ per tahun bagi perekonomian Australia, sementara beasiswa yang disediakan Australia bagi mahasiswa Indonesia bernilai 16,25 juta A\$ per tahun. Tentunya kelak di kemudian hari diharapkan para mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Australia tersebut akan menularkan pemahaman mendalam mereka mengenai Australia di Indonesia, apalagi jika sebagian diantara mereka memegang posisi kunci di berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta di Indonesia.<sup>8</sup>

Selain itu, banyaknya event yang bertajuk untuk saling mempererat persahabatan kedua negara mengurangi dan meredam masalah-masalah yang terjadi selama masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard. Lebih banyaknya pertemuan (conference) antara kedua negara ini dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan merupakan titik penting bagi kedua negara untuk saling bekerja sama. Salah satunya yaitu Festival Budaya Indonesia yang setiap tahunnya dilakukan pemerintah Indonesia di negara Australia, kemudian berkaitan

---

<sup>8</sup> *Ibid*,



dengan pertahanan dan keamanan kedua belah pihak telah bersama-sama menandatangani *Memorandum of Understanding Counter on Terrorism*.

Seratus persen bisa, untuk mendapatkan hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang semakin kuat dan semakin baik. Namun demikian, diperlukan fondasi yang lebih stabil untuk menjaga hubungan tersebut dalam jangka panjang. Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, TM Hamzah Thayeb pada National President Forum bertema Indonesia *From Neighbour to Partner* yang diselenggarakan tahun 2007 lalu oleh Australian Institute of International Affairs di Parliament House, menyatakan dengan jelas tentang hal tersebut, tinggal bagaimana kedua negara menyikapinya dengan baik.

Semakin kuat dan baiknya hubungan kedua negara, tidak hanya disebabkan oleh sejarah dan letak geografis kedua negara, tetapi juga karena kedua negara telah memiliki berbagai ragam bidang kerja sama bilateral, khususnya adanya kesepakatan *Comprehensive Partnership* dari kedua pemimpin negara. Penyelesaian Ratifikasi Perjanjian Lombok perlu dilakukan secepatnya dimana hal ini akan membuat hubungan kedua negara semakin kokoh.<sup>9</sup> Hubungan bilateral kedua negara perlu memiliki fondasi yang lebih stabil sehingga pergantian pimpinan di masing-masing negara tidak mempengaruhi hubungan kedua negara yang telah terjalin. Namun, faktor terbesar dalam hubungan kedua negara ini adalah adanya saling pemahaman antarbangsa, semakin baik tingkat pemahaman antar kedua negara akan

---

<sup>9</sup> Seminario de Nossa. *Historia De Timor Leste*. Yogyakarta, hlm. 89-109.

meningkatkan kerjasama menuju hubungan yang semakin baik dan kokoh, begitu pula sebaliknya. Hal itu dapat dicapai dengan meningkatkan pendidikan dalam kebudayaan, bahasa dan tata krama masing-masing negara.<sup>10</sup>

## 2. *Diplomasi antara kedua Negara*

Tiga belas tahun lamanya, Partai Buruh telah berkuasa di Australia, sampai dengan kurun waktu yang sangat lama untuk suatu system pemerintahan demokrasi dari dua kelompok partai. Paul Keating dan partai Buruh dikalahkan oleh Partai Liberal dan Partai Nasional di bawah kepemimpinan John Howard. Selama tiga belas tahun baik pemerintahan Bob Hawke maupun Paul Keating yang pada waktu itu mengubah orientasi negaranya dari Eropa ke Asia.

Pemerintah Indonesia saat ini perlu menunjukkan keseriusannya menjalin kemitraan yang strategis dengan pemerintahan Australia di bawah kepemimpinan Kevin Rudd. Hal itu dikarenakan dilema yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia selama ini sering ditafsirkan oleh elemen domestik Indonesia sebagai sikap tidak tegas pemerintah Indonesia dalam menghadapi arogansi pemerintahan Australia.

Australia dan Indonesia untuk meningkatkan upaya-upaya membangun hubungan baik atas dasar prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan antara dua negara yang bertetangga yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang berarti bagi pencapaian-pencapaian yang konkrit bagi rakyat kedua negara. Negara-negara di kawasan tentu mengharapkan jalinan hubungan Australia

---

<sup>10</sup> *Ibid*,

dan Indonesia tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan nasionalnya masing-masing tetapi juga untuk memperjuangkan kestabilan dan keseimbangan pengaruh di kawasan Asia-Pasifik.<sup>11</sup>

Perubahan haluan ke Asia dilakukan dengan membangun hubungan efektif antara Australia-Indonesia. Pada waktu pemerintahan Paul Keating hubungan bilateral itu kecuali di beri agenda dan di sertai semangat dan warna hubungan pribadi yang sangat baik antara Paul Keating dengan Presiden Soeharto.

#### 1. Kepentingan Ekonomi

Dari segi Ekonomi, nilai ekspor Indonesia ke Australia sebenarnya kecil hanya 3,14 % (US\$1.533,5 juta) dari nilai ekspor keseluruhan. Bila pada tahun 1995 nilai ekspor ke Australia menduduki peringkat 12 pada tahun 1999 meningkat menjadi peringkat 8. Komoditi utama yang diekspor ke Australia adalah minyak mentah yaitu sebesar 42,89% (US\$657,7 juta) dari total nilai ekspor

#### 2. Kepentingan Politik

Dari sudut kepentingan politik dan diplomasi, Australia merupakan negara yang penting dan amat diperlukan oleh Indonesia sebagai partner di dunia Internasional guna menyukkseskan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Kesamaan kultur, system politik dan bahasa dengan negara-negara kuat dunia khususnya Amerika dan negara-negara Eropa Barat, membuat Australia jauh

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

lebih dapat diterima oleh negara-negara tersebut dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

### 3. *Usaha Pemulihan dalam Penyelesaian Masalah Australia-Indonesia*

Pasukan militer Australia masuk ke wilayah Timor-Timur bersama pasukan perdamaian PBB. Yang pada pertama kalinya.<sup>12</sup> Konsekuensi dari keputusan politik sebagai anggota masyarakat dunia tidak hanya harus menjaga esensi kedaulatan dan citra Indonesia, tetapi juga harus mampu menjaga hubungan baik dengan bangsa lain secara kooperatif. Tidak mengagetkan lagi adanya krisis hubungan Australia-Indonesia yang semakin memburuk kebelakangan ini, gabungan warga asing yang masuk ke wilayah Timor-Timur di pimpin oleh Piter Corgrove, yang pada waktu itu ingin mengatakan bahwa adanya konflik Australia-Indonesia tidak benar.

Koofi Annan sekjen PBB berhasil mengantarkan Australia agar percaya kepada dewan keamanan PBB untuk menjalankan kepemimpinan untuk sebuah mie gabungan untuk perdamaian di Timor-Timur. Australia juga mendapatkan gabungan dukungan dengan dibentuknya PKO. Maka tidak menjadi suatu hal yang baru lagi Koffi Annan juga berhasil menduniakan adanya krisis di Rwanda, Bosnia, Kosovo. Resolusi DK No 1264/99 pada tanggal 15 September adanya persoalan yang dihadapi Timor-Timur yaitu tuntutan bagi mereka yang terlibat pada suatu kejahatan

---

<sup>12</sup> Hilman Adil. *Hubungan Australia dengan Indonesia 1942-1962*. Jakarta: Djambatan.1993, hlm. 10.

atas kemanusiaan akan menjadi beban baru yang akan merusak citra Indonesia secara menyeluruh.<sup>13</sup>

Penyelesaian masalah Timor-Timur mayoritas masyarakat Timor-Timur memilih kemerdekaan dan proses lanjutan yang pada waktu itu sedang berlangsung, pada sebagian masyarakat Timor-Timur menolak yaitu pada deklarasi Balibo 1975. Australia seharusnya bisa mengerti bahwa penyelesaian masalah Timor-Timur tidak bisa dianggap mudah yang pada waktu itu hanya diserahkan kepada keamanan PBB. PBB di bawah kepemimpinan Koffi Annan seharusnya mampu menyelesaikan persoalan sehingga tidak menjadi persoalan yang semakin memburuk dan menjadi persoalan yang baru yang akan menggelobal serta menjadi komoditas politik Australia, sementara persoalan ini tidak biasa diselesaikan. Ada tiga tahap yang dilakukan untuk langkah pemulihan masalah Timor-Timur yaitu:

1. Pemulihan ketertiban masalah Timor-Timur
2. Rikonsiliasi kelompok prokemerdekaan dengan otonomi dan solusi alternatif
3. Pasukan perdamaian PBB harus benar-benar mampu memulihkan keadaan tanpa menimbulkan ketegangan baru.

Penyelesaian masalah Timor-Timur yaitu kesepakatan dari pihak yang memperoleh kemenangan dan pihak yang kalah. Misi dari pasukan PBB di Timor-Timur di bawah komando Australia ini menciptakan suatu perdamaian dan bukan suatu kemarahan atau balas dendam, yaitu untuk memerangi kelompok bersenjata

---

<sup>13</sup> *Kompas* 23 September 1999, hlm. 4.

yang menginginkan bergabung dengan Indonesia. Sebagai Negara tetangga yang sering menghadapi konflik sejak tahun 1999, dan setelah itu terjadi kerusuhan di Timor-Timur, dan hubungan antara Indonesia-Australia mulai pulih dan semakin baik.<sup>14</sup>

Dalam upaya penyelesaian masalah Timor-Timur, adanya hubungan diplomasi yang dijadikan sebagai penghubung adalah diplomat, presiden, pejabat militer, serta berbagai institusi. Factor-faktor internal Indonesia yang perlu di evaluasi dalam upaya memperbaiki system serta mekanisme hubungan diplomatik. Kelemahan diplomasi Indonesia, baik dalam segi menyusun suatu keputusan maupun dinamika internal sangat signifikan, adanya peran-peran politik oleh militer serta diplomat. Hal ini terjadi karena sebagai panglima tertinggi seluh Angkatan Bersenjata Ripublik Indonesia, presiden dapat mengintervensi politik luar negeri serta upaya diplomasi yang pada waktu sebelumnya dilakukan oleh para pejabat. Kepentingan militer, struktur organisasi.<sup>15</sup>

Deplu yang bersifat kaku dapat bersifat baik, para pejabat militer yang menempatiposisi setrategis dalam Deplu, sehingga muncul anggapan yang kurang baik tentang militer di depan pejabat Deplu dan para Diplomat. Sebagai Diplomat, para pejabat militer tidak memiliki pelatihan dan pengalaman yang sangat baik untuk menangani masalah hubungan internasional dan dilomasi. Intervensi militer di Deplu

---

<sup>14</sup> *Kompas* 14 November 2006, hlm. 1-2.

<sup>15</sup> *Kompas* 31 Maret 2006, hlm. 9.

membuat Deplu mengalami suatu kesulitan dalam menjalankan politik luar negeri yang independen, dominasi pimpinan tertinggi eksekutif di dalam pembuatan keputusan.<sup>16</sup>

Rezim kepemimpinan Soeharto ketika itu membuat deplu kemudian hanya berperan sebagai departemen teknis yang menangani masalah rutin dan sifatnya administrative. Sedangkan untuk masalah yang berkenaan dengan HAM, hubungan diplomatik, tindakan represif dalam pergaulan internasional, cenderung didominasi oleh para pejabat militer yang pro terhadap pimpinan eksekutif dan rezim. Deplu hanya berperan sebagai agen hubungan masyarakat yang harus menjelaskan kepada dunia internasional diplomatis dibalik kejadian tersebut. Lemahnya setrategi dan taktik diplomasi deplu.

Terkait khusus Timor-Timur, tidak ada setrategi khusus menyangkut persepsi yang coba ditanamkan oleh pemerintah Indonesia terhadap publik (baik internal maupun internasional) saat kasus ini dianggap sebagai kasus pelanggaran HAM yang penting di dunia internasional. Indonesia malah mempersepsikan diri bahwa segala jenis tekanan internasional tersebut hanya bentuk intervensi dunia terhadap politik luar negeri Indonesia.<sup>17</sup> Masa dan pimpinan prodistegrasi Timor-Timur dengan aktif menjalin jaringan diplomatic dengan Australia, baik dengan Australia, baik pada pemerintahan maupun menarik perhatian media massa. Mereka melakukan diplomasi

---

<sup>16</sup> *Kompas* 15 April 1988, hlm. 6.

<sup>17</sup> *Kompas* 18 April 1988, hlm. 1.

publik melalui berbagai aktivitas lobby informal dan aksi-aksi yang melibatkan masyarakat luas serta media massa internasional.<sup>18</sup>

Khususnya tentang Indonesia, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia secara dinamis mengalami pasang surut pada setiap tahapannya. Hubungan kedua negara khususnya di tingkat formal antara pemerintah berjalan dengan baik. Namun di lain waktu hubungan keduanya berjalan dalam suasana tegang, saling menyalahkan, dan penuh dengan retorika pertentangan. Indonesia dan Australia memang sudah ditakdirkan untuk menjadi dua negara yang bertetangga. Secara geografis kedua negara berdekatan tetapi secara kultural kedua bangsa ini sangat berbeda. Dari aspek kepentingan nasional, Australia akan tetap mempertimbangkan beberapa hal penting:

1. Indonesia dianggap sebagai negara tetangga yang secara geografis sangat strategis bagi kepentingan Australia.
2. Indonesia yang telah memasuki tahapan demokrasi yang cukup matang adalah modal utama bagi Australia untuk mengadakan kontak kelembagaan yang dapat menyebabkan meluasnya pengaruh Australia di Indonesia, khususnya di tataran elit kekuasaan.
3. sebagai negara mayoritas Muslim terbesar, Indonesia adalah mitra yang tidak mungkin dikesampingkan terutama apabila kelembagaan militer Indonesia

---

<sup>18</sup> *Kompas* 1 Januari 1999, hlm. 23.



lebih dapat diandalkan dalam perjuangan Australia melawan terorisme internasional.

4. Walaupun belum sepenuhnya pulih, Australia memandang ekonomi yang stabil dan kokoh akan menjadi jalan bagi terus berlangsungnya hubungan transaksi perdagangan internasional serta terbukanya pasar Indonesia bagi ekspor barang-barang dengan teknologi tinggi Australia di era kawasan perdagangan bebas.<sup>19</sup>
5. Australia memiliki potensi di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, perdagangan, politik, pertahanan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digali oleh pihak Indonesia.

Diplomat Indonesia Mochtar Kusumaatmaja, lebih banyak melakukan diplomasi kebatinan. Diplomat Indonesia bukan merupakan Diplomat yang tidak memiliki kemampuan khusus terhadap tekanan publik. Budaya rezim telah mendidik Diplomat menjadi actor yang cenderung diam serta sulit berkomunikasi. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terkait dengan pelanggaran berat HAM di Timor-Timur, paska Jajak Pendapat 1999 merupakan penyelesaian sengketa kontroversial. Meskipun bukan hal sama sekali baru, kesepakatan kedua kepala Negara untuk tidak menggunakan

---

<sup>19</sup> *Kompas* 2 Oktober 1999, hlm. 11.

peradilan terkait dengan pelanggaran berat HAM hampir sama dengan model perundingan konflik Gerakan Ceh Merdeka (GAM) dengan RI di Aceh.<sup>20</sup>

Bulan Agustus 2005, pemerintah RI dengan GAM telah menandatangani MoU di Helsinki. Untuk menghentikan kekerasan akibat konflik bersenjata non-internasional (bukan perang antara dua Negara berdaulat). Pelanggaran berat HAM di Aceh, dikenal sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) terjadi sejak 1988, merupakan alasan utama persetruan GAM dengan RI. Kedudukan Aceh yang ketika itu berpeluang memisahkan diri (self-determination) dari NKRI menjadi tertutup. Sejak MoU Helsinki ditandatangani, impian kultural masyarakat Aceh yang dulu dicita-citakan, juga pemberlakuan hukum berdasarkan syariat Islam, dengan suasana lebih aman dan damai saat ini telah menjadi kenyataan di Aceh.

Penyelesaian diplomatis, terkait kasus pelanggaran berat HAM, oleh Presiden SBY dengan Ramos Horta mampu meretas jalan terjal hubungan bilateral Indonesia-Timor-Timur ke depan menjadi lebih baik. Tentu saja jawaban bukan sekedar adanya klise dapat dan tidak. Berbagai argumen perlu dikedepankan untuk melihat seberapa jauh penyelesaian secara diplomatik telah menjadi kepentingan nasional kedua Negara.

---

<sup>20</sup> *Kompas* 9 Oktober 2002, hlm. 6.

Pernyataan bersama Presiden SBY dengan Ramos Horta, bertumpu pada temuan laporan KKP 14 Juli lalu di Denpasar, telah sampai pada suatu kesepakatan yang memihak kepentingan nasional.<sup>21</sup>

Penyesalan atas terjadinya pelanggaran berat HAM dan agar peristiwa tersebut tidak terulang merupakan sikap yang progresif. Seara tersirat, kesepakatan tersebut dapat berarti proses pengadilan menjadi tertutup. Namun, yang menjadi catatan kita adalah bahwa pengaduan atau penuntutan masih dimungkinkan mengingat hak-hak konstitusional korban telah dijamin dalam UUD 1945.<sup>22</sup>

Terhadap kesepakatan kedua Negara tersebut, yaitu penyelesaian di luar pengadilan bukan tanpa alasan relevan. Sebab, menurut Mac Gallenther, “perolehan keadilan juga terdapat di luar pengadilan, termasuk melalui jalur perundingan dan diplomasi, atau Justice is in Many Rooms. Proses pengadilan, sebagai lembaga kedaulatan hukum suatu Negara ternyata bukanlah satu satunya cara umat manusia menyelesaikan konflik secara adil. Karena itu apa yang dikatakan Steve Smith terkait dengan sikap kompromi dalam suatu penyelesaian diplomatic berkesesuaian.

Penyelesaian diplomatis untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM, bahwa untuk kasus-kasus tertentu menjadi pilihan. Sebab, sistem hukum nasional dan internasional terkadang tidak dapat diterapkan. Sebab, selain tidak mampu mengakomodir perbedaan kepentingan kedua Negara, juga pertimbangan

---

<sup>21</sup> *Kompas* 1 Agustus 2006, hlm. 10.

<sup>22</sup> *Kompas* 31 Maret 2006, hlm. 7.

kemaslahatan bagi kepentingan nasional menjadi target utama. Meski kesepakatan kedua kepala Negara tampak lebih merupakan komitmen bilateral, kedua Negara akan terikat untuk mematuhi dan menghormatinya atau patuh pada kaidah 'Pacta Sunt Servanda'. Sekiranya pemberian kesepakatan bagi pihak pemerintah Timor-Timur terdapat unsur keterpaksaan, melunaknya sikap pemerintah Timor-Timur dipastikan ada kaitannya dengan harapan penciptaan hubungan bertentangga baik (good neig bourhood relations).<sup>23</sup>

Kurangnya respon kritis publik akhir-akhir ini terhadap hasil KKP, tidak berarti bahwa penyelesaian diplomatis telah berjalan tanpa cela. Ketidakadilan mulai timbul ketika sebagian pelaku diputus pengadilan negeri bersalah (found guilty). Seperti Eurico Guterres, Mantan Pimpinan Milisi Pro-Anti Integrasi, dan Albio Soares, Gubernur Timtim dinyatakan bersalah sebagai pelaku pelanggaran berat HAM.

TNI dan juga Polri yang ketika itu sama memegang tanggung jawa pemerintahan dan keamanan terbebaskan. Sementara itu, hasil laporan KKP tampak telah menjadi media rekonsiliasi atas kebuntuan komunikasi politik antara Presiden SBY dengan TNI. Sehingga tidak musthil perasaan simpatik dari korp TNI akan muncul mengingat hasil KKP telah membebaskan pelaku pelanggar HAM dari pertanggungjawaban. Beberapa nama yang diuntungkan kebijakan SBY antara lain

---

<sup>23</sup> *Kompas* 16 September 1999, hlm. 6.

Mayjen Adam Damiri (Pangdam Udaya), Brigjen Timbul Silaen (Kapolda Timor-Timur), Brigjen Tono Suratman (Danrem Wira Dharma), Letkol Noer Moeis (Danrem Wira Dharma), dan Letkol Inf Sujarwo (Dandim Dilli).

Fakta ini dengan jelas memperlihatkan secara jelas bahwa adanya kontradiksi dan perbedaan perlakuan. Sehingga menjadi sangat tidak mudah untuk memupus kesan bahwa korp TNI adalah kebal atau tidak tersentuh hukum (untouchable by the law). Jendral Wiranto bahwa peradilan Adhoc, tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan ada tidaknya anggota TNI melakukan pelanggaran berat HAM sesungguhnya mengesankan di mata masyarakat internasional bahwa kekuasaan pengadilan tak akan mampu menerobos dinding imunitas hukum TNI.<sup>24</sup>

Untuk mengantisipasi ketidak mampuan sistem peradilan nasional, sebagai awal timbulnya peluang tersangka bebas dari pertanggung jawaban hukum, maka wajib diberlakukan asas Universal Jurisdiction untuk jenis kejahatan HAM ang tidak dapat dikurangi. Misalnya, pelanggaran berat HAM disejajarkan dengan kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaan, pembunuhan sstematis atas dasar suku, agama atau ras, dan bahkan juga pebajakan. Pelanggaran berat HAM sebagai akibat Jajak Pendapat di Timor-Timur mewajibkan Negara-negara pihak untuk mematuhi Konvensi Genewa dan Den Haag. Dalam Statuta Roma 1998, tentang Konvensi

---

<sup>24</sup> Jawahir Thontowi. *Hukum Internasional Umum*. Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS). 2009, hlm. 25.

Mahkamah Pidana Internasional, pelanggaran berat HAM tidak dapat mengabaikan pentingnya penggunaan pengadilan, baik dalam yurisdiksi nasional maupun internasional.<sup>25</sup>

Penyelesaian diplomasi atas kasus pelanggaran berat HAM di Timor-Timur berdasarkan hasil laporan KKP, bukan merupakan upaya mencari kebenaran dan keadilan bagi pihak korban dan pelaku. Tingkat komitmen atas pemenuhan kewajiban internasional tidak menjadi pilihan ketika penyelesaian melalui peradilan nasional atau internasional belum mampu menciptakan terselenggaranya tatanan sosial, politik, keamanan dan pertahanan di masa mendatang bagi hubungan timbal balik RI dengan Timor-Timur.

### *1. PBB*

Sebagai Organisasi politik internasional yang utama, perserikatan Bangsa-Bangsa telah lama menjadi medan perdebatan yang paling penting mengenai Timor-Timur. Pembahasan PBB mengenai persoalan Timor-Timur telah dimulai ketika Portugal pertama menjadi anggota badan dunia itu pada tahun 1955, tetapi sampai jatuhnya kediktatoran Portugis tahun 1974, Lisabon menolak mentaati piagam PBB mengenai administrasi wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri. Dukungan yang diberikan Negara-negara sekutu kepada Jakarta menjamin bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa badan dunia yang misi pendirian ditujukan untuk menyelamatkan

---

<sup>25</sup> *Kompas* 8 Januari 1999, hlm. 18.

Generasi-generasi mendatang dari penderitaan akibat peperangan. Tahun 1975 barulah PBB memberikan perhatian pada keadaan di Timor-Timur, khususnya mengenai Dekolonisasi PBB mengadakan rapat di Lisabon tetapi hanya meminta kepada Portugal agar menciptakan keadaan yang memungkinkan rakyat wilayah itu mencapai tujuan yang dikemukakan dalam Deklarasi mengenai pemberian kemerdekaan kepada negeri dan rakyat jajahannya.

PBB tidak ikut campur tangan pada saat peperangan sipil yang dilakukan Indonesia pada Agustus 1975 dan sesudah itu dilanjutkan dengan penyusupan militer Indonesia dari Timor Barat, apabila PBB ikut campur tangan, konflik akan teratasi dengan baik sebelum terjadinya invasi Indonesia. Ketidak bertindaknya badan dunia ini disebabkan karena mereka tidak terlalu mendukung adanya invasi dari Indonesia untuk mencaplok kembali Timor-Timur, hal ini juga didukung kurangnya dukungan Negara-negara Barat.

Pada waktu PBB mulai mengatasi ini, ini sudah terlambat untuk menghentikan invasi Indonesia. Komite keempat mengesahkannya ke Majelis Umum yang mengadopsi resolusi pada Desember 1975 dengan suara 72 mendukung, 10 menentang, dan 43 abstain. Resolusi Alternatif itu juga meminta Dewan Keamanan untuk melakukan tindakan mendesak untuk melindungi keutuhan wilayah Timor-Timur dan hak rakyatnya atas penentuan nasib sendiri, serta meminta badan Internasional mengirimkan fakta ke wilayah itu secepatnya. Sementara rakyat Timor-Timur mengharapkan pemungutan suara yang lebih kuat.

## 2. Pendekatan Melalui ABRI

Kehadiran dan peranan ABRI di Timor-Timur merupakan salah satu aspek integral yang cukup penting. Semua pihak mengakui bahwa ABRI aktif berperan sehingga kegiatan pembangunan di Timor-Timur dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian partisipasi ABRI dalam membangun masyarakat kiranya sedapat mungkin menciptakan etos kerja dalam nurani warga Timor-Timur, agar tidak muncul kesan bahwa warga masyarakat sipil hanya tinggal menerima.<sup>26</sup>

ABRI tidak hanya dipandang sebagai pengaman untuk membersihkan GPK, melainkan lebih penting dari itu untuk mengintensifkan pembangunan di seluruh kawasan Timor-Timur. Salah satu ciri terpenting dalam kehidupan sistem politik demokrasi pancasila ini adalah hadirnya ABRI ini, melalui angkatan bersenjata ini merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan negara dan sekaligus sebagai kekuatan sosial politik.

## 3. Pendekatan Pemerintah

Adanya tekad bulat dari hati nurani rakyat Timor-Timur untuk menentukan nasibnya sendiri maka terjadilah Deklarasi Balibo pada tanggal 30 November 1975. Pemerintah dan rakyat Republik Indonesia menyambut baik adanya deklarasi tersebut dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tanggal 17 Juli.

---

<sup>26</sup> P. Gregor Neonbasu, SVD, *Peta Politik dan Dinamika Pembangunan Timor-Timur*, Jakarta : Yanense Mitra Sejati, 1997, hlm. 161.



Strategi awal pembangunan di Timor-Timur ditempuh dengan Crash Program yang dilaksanakan dalam tiga tahap , yakni :

1. Tahap pembangunan Rehabilitasi : Pada tahun 1976-Maret 1977 sasaran utama pembangunan dalam tahap pertama ini adalah merehabilitasi seluruh prasarana dan sarana umum seperti rumah sakit, balai pengobatan, sekolah, sarana telekomunikasi dan perhubungan.
2. Tahap pembangunan Konsolidasi : April 1977-Maret 1978 sasaran utama adalah melanjutkan serta meningkatkan langkah-langkah pembangunan sebelumnya sehingga menjangkau penataan dan perbaikan yang lebih luas. Misalnya pemantapan aparatur pemerintahan, peningkatan dan pembangunan ekonomi rakyat, peningkatan prasarana dan sarana pendidikan.
3. Tahap pembangunan Stabilisasi : April 1978-Maret 1979 sasaran utamanya langsung diarahkan kepada pemantapan serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan aparat pemerintahan daerah secara menyeluruh dan terpadu.

## **B. Kecurangan Australia terhadap Timor-Timur**

Hubungan diplomatik Australia-Indonesia sedang mengalami pasang surut, dan John Howard juga menyatakan bahwa pemerintahnya tidak akan meminta maaf kepada Indonesia. Isu Timtim sejak lama telah menjadi bagian dari politik dalam negeri Australia. Suara pro dan kontra tentang kebijakan Australia terhadap

Indonesia datang silih berganti. Puncaknya, pada masa Paul Keating kebijakan Australia terhadap Indonesia sangat dekat, bahkan hampir-hampir dikatakan bahwa Keating itu adalah salah seorang sahabat Indonesia ditengah masyarakat Australia yang kritis terhadap kekuasaan Presiden Soeharto.<sup>27</sup>

Kepentingan politik Australia yang paling kentara terhadap Timor-Timur pertama-tama adalah menghindari tidak melebarnya konflik di Timor-Timur, menjadi ancaman bagi wilayah Australia. Negeri Kangguru menghendaki Timor-Timur stabil sehingga hubungan politik RI-Australia tidak terganggu. Oleh karena itu pada masa awal Australia seperti "memihak" Indonesia dengan. Mengakui batas-batas wilayah di daerah Timor-Timur. Puncak pengakuan itu adalah disepakatinya pembagian Celah Timor berdasarkan ketentuan yang disepakati kedua pihak oleh Menlu Ali Alatas dan Menlu Gareth Evans. Secara eksplisit adanya pengaturan batas laut di wilayah yang kaya minyak itu menjadikan Australia negara yang pertama mengakui eksistensi Indonesia atas Timor-Timur.

Hadirnya John Howard sikap Australia berubah total. Mereka mulai menyatakan bahwa Timor-Timur untuk jangka panjang harus merdeka. Australia mulai mengubah kebijakannya atas Timor-Timur dengan dasar bahwa otonomi luas harus diberikan kepada Timor-Timur sebelum merdeka penuh. Sikap ini dilandasi oleh kepentingan jangka panjang Australia terhadap Timor-Timur dan Indonesia. Terhadap Timor-Timur, Australia seolah-olah ingin membalas kesalahan masa lalu

---

<sup>27</sup> *Kompas* 5 Oktober 1988, hlm. 20.

dengan mengakui eksistensi Indonesia di Timor-Timur yang sampai tahun 1998 tidak diakui PBB.<sup>28</sup>

Australia juga menilai dengan pendekatan ke Timor-Timur diharapkan bisa menanamkan pengaruhnya di wilayah berpenduduk 800.000 jiwa ini. Pengaruh Australia di Timtim ini seperti halnya pengaruh Australia di Papua Niugini melebarkan lingkungan pengaruh politiknya yang dianggapnya sudah layak diperbesar. Di tengah krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia, termasuk Indonesia, posisi Australia sangat menguntungkan.

Krisis ekonomi tidak menyebar ke Australia sehingga ketika posisi negara Asia lemah, negeri ini berada dalam kondisi sehat baik militer, politik maupun ekonomi. Kepentingan Australia terhadap Indonesia adalah melakukan unjuk kekuatan politik atas Timor-Timur. Dengan intervensi militer ke Timor-Timur, Australia mengirim pesan kepada Jakarta tentang kemampuan diplomatiknya yang berskala global. Dengan pendekatan kepada Amerika Serikat dan Eropa, Australia dapat menggolkan rencananya untuk memaksa masuk ke Timor-Timur di bawah PBB.<sup>29</sup>

Hubungan Australia dan Timor Leste bukan juga baru terbentuk sejak Timor Leste lepas dari Indonesia, tapi telah berlangsung lama sebelum Timor Leste menjadi negara. Namun hubungan itu bukan dalam bentuk “*state*”, karena ada rezim yang menguasainya. Hubungan Australia dan Timor-Timur semakin intens sejak Indonesia

---

<sup>28</sup> *Ibid*,

<sup>29</sup> Hilman Adil, *op,cit*, hlm.50.

mengalami krisis. Perjuangan rakyat Timor-Timur untuk merdeka diperkuat dengan bantuan Australia sampai menuju kemerdekaan. Namun belakangan hubungan kedua negara yakni Timor-Timur dan Australia menjadi buruk, karena hubungan kedua negara ditentukan oleh dua kepentingan yang sama yaitu kedaulatan teritorial atau perbatasan dan sumber daya alam yang menjadi permasalahan dari kedua negara.<sup>30</sup>

Kedua hal ini bukan persoalan baru tapi merupakan kisah lama yang berlanjut dan rumit karena berakar dari progres hukum internasional yang berubah. Australia merasa claim atas teritorialnya “*legitimate*” dengan konvensi Genewa tentang hukum laut 1958, begitu pun Timor Leste merasa lebih berhak dengan konvensi PBB mengenai hukum laut UNCLOS 1982. Karena di dalam daerah yang disengketakan itu terdapat potensi ekonomi yang sangat signifikan bagi kedua negara, maka logika sehatnya memang mengharuskan mereka bertengkar.

Pertengkar itu bisa saja diselesaikan bila para pihak ingin selesai. Lembaga Hukum Internasional tersedia bila para pihak menghendakinya. Namun hukum internasional tak memiliki kekuatan memaksa seperti lembaga nasional. Menyusul pengumuman Australia keluar dan Mahkamah Internasional maka pilihan penyelesaian tinggal pada kreatifitas bilateral. Dari sini dapat dilihat bahwa pemufakatan, diplomasi dan negosiasi mengambil tempat untuk penyelesaian persoalan ini. Untuk satu masalah sumberdaya yang berupa minyak dan gas,

---

<sup>30</sup> Chandrawati Nuraini. *Perkembangan Konsep-Konsep Keamanan dan Relevansinya terhadap Dinamika Keamanan Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : Dephan RI, 2001, hlm. 34.

walaupun lewat ancaman-ancaman mereka berhasil mencapai kesepakatan “*Joint Petroleum Development Area*” yang mereka namakan “*Timor Sea Treaty*” dengan porsi 90:10, tapi persoalan perbatasan terus berlanjut. Karena kedua negara belum menyepakati batas wilayah yang merupakan salah satu ladang yang mempunyai kandungan gas terbesar dibandingkan dengan ladang yang lainnya itu wilayah *Greater Sunrise*.<sup>31</sup>

Wilayah *Greater Sunrise* merupakan wilayah yang mempunyai batas yang paling dekat dengan Timor Leste yang sebagian wilayahnya berada di wilayah JPDA dan ZEEnya berdasarkan UNCLOS 1982. Sejak kemerdekaan Timor Leste diperoleh, babak baru perundingan juga dimulai, tetapi pengakuan akan warisan “*colonial*” Indonesia dan Australia yang sangat menguntungkan pemerintah John Howard dan Tuan Alexander Downer tidak pernah ditinggalkan. Data statistik, geologi dan perminyakan telah membuktikan keberadaan simpanan minyak yang meluas di daerah Timor Gap hingga perbatasan sebelah timur dari Wilayah Pengembangan Minyak Bersama (JPDA) dan simpanan minyak tersebut dikenal sebagai ladang minyak Sunrise dan Troubadour (bersama-sama dikenal sebagai Greater-Sunrise).

Selama ini Timor-Timur dan Australia telah membuat klaim perairan namun belum dapat membatasi perbatasannya, termasuk di wilayah Laut Timor dimana Greater Sunrise berada. Padahal kalau dilihat berdasarkan batas equidistance atau median line (batas pertengahan), Greater Sunrise ini juga menjadi milik negara

---

<sup>31</sup> *Ibid*,

baru ini. Australia selama ini mencoba “memaksa” Timor-Timur untuk melupakan penentuan batas wilayah maritime sehingga mereka bisa mengklaim, produksi, untuk membuat ketentuanketentuan bagi eksploitasi yang tidak terpisahkan dari Greater Sunrise. Timor-Timur ditekan untuk menyetujui penyatuan Greater Sunrise dan membagi hasil dengan Australia.<sup>32</sup>

Berdasarkan penekanan ini dibuatlah suatu dokumen penyatuan yang dinamakan *International Unitisation Agreement (IUA)* dimana Timor-Timur akan dipaksa untuk menyetujui diberikannya 79.9% % dari produksi minyak di ladang Greater Sunrise kepada Australia dan Timor-Timur hanya mendapatkan 20.1%. Padahal kalau garis batas equidistance ditarik maka kemungkinan bahwa semua hasil merupakan milik Timor-Timur sangatlah besar.

Pemerintah Australia dan Parlemen-nya telah menandatangani dan meratifikasi IUA, dan memaksa Timor-Timur untuk menyetujuinya, dan pemerintah kita sendiri telah menandatangani. Sekarang harapan kita hanya bertumpuh pada Parlemen agar melakukan perubahan terlebih dahulu sebelum meratifikasi IUA tersebut, karena bisa saja menguntungkan Australia dan memaksa kita untuk tidak mematok batas laut kita atau menunda hingga beberapa puluh tahun mendatang. Timor-Timur merupakan sebuah negara muda yang baru saja mengalami transisi yang penuh gejolak selama 24 tahun bergabung dengan Indonesia, dan pada akhirnya secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 2002. Dalam prosesnya menuju ke sebuah negara yang

---

<sup>32</sup> *Tempo* 22 Januari 2006, hlm. 3.

merdeka, tentunya tidak terlepas dari keterlibatan pihak asing dan media dalam upaya menegakkan HAM dan membantu menjadi sebuah negara yang merdeka. Dalam hal ini pemerintah Indonesia dinilai lamban dalam menyelesaikan permasalahan status Timor-Timur dan upaya penegakan HAM di sana. Dalam kurun waktu 1976-1999 telah terjadi banyak sekali aksi pelanggaran HAM di Timor-Timur. Salah satunya adalah insiden Dili yang terjadi pada tanggal 12 November 1991.<sup>33</sup>

Pembantaian pemuda Timor-timur di pemakaman Santa Cruz oleh para serdadu Indonesia dapat dikatakan merupakan sebuah titik balik dalam perjuangan rakyat Timor untuk diakui secara internasional. Terlebih lagi, peristiwa tersebut terekam dan difilmkan oleh seorang jurnalis Asing dari Amerika Serikat, Max Stahl, yang pada akhirnya disiarkan melalui media internasional .

Peristiwa ini ditayangkan oleh berbagai televisi di seluruh dunia dan menyingkap keadaan sebenarnya tentang penindasan yang keras oleh militer Indonesia. Berita ini segera menyebar dengan cepat dan berakibat pada meningkatnya aksi solidaritas secara dramatis. Banyak wartawan asing dan pekerja LSM ke Timor-Timur dan mengharapkan kedatangan misi Portugis dan tindakan dari dunia internasional untuk menghentikan adanya aksi pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Timur. Australia dan Portugal, demonstrasi masa, yang digerakkan oleh gerakan solidaritas non-pemerintah dan orang-orang Timor yang berada di pengasingan, mengusahakan campur tangan internasional. Lewat foto-foto dengan

---

<sup>33</sup> *Ibid*,

kesan yang kuat dari markas UNAMET di Dili, dan pesan dari wartawan serta pihak-pihak lain di markas tersebut, informasi mereka mendominasi berita internasional dan terus menekan Indonesia dan meminta pemimpin dunia untuk melakukan campur tangan. Sekjen PBB, Kofi Annan, melakukan diplomasi pribadi yang sifatnya mendesak. Upaya pertamanya bertujuan meminta Indonesia untuk memenuhi kewajiban keamanan.

Sebagai suatu reaksi atas tekanan dunia internasional, organisasi internasional PBB mengirimkan wakilnya dalam misi yang dinamakan UNAMET. Peran PBB dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Timor-Timur sudah seharusnya dilihat dari sudut pandang netral dan menyerahkan segala keputusan kepada rakyat Timor-Timur, tetapi ternyata kenyataan dilapangan membuktikan bahwa ada tindakan kecurangan dan keberpihakan UNAMET terhadap kelompok Anti-Integrasi.<sup>34</sup>

UNAMET sebagai perwakilan PBB secara khusus memfasilitasi proses referendum Timor-Timur agar berjalan secara adil dan representatif, tapi ternyata diluar dugaan justru kinerja UNAMET sangat mengecewakan. Menurut Jubir UNIF Basilio Dias Araujo, dalam siaran pers UNIF pada 30 Agustus 1999 menyatakan ada konspirasi internasional yang menginginkan Timor Timur lepas dari Indonesia. Mereka meminjam tangan PBB. UNAMET dan berusaha keras dengan cara apa saja untuk memenangkan kelompok Anti-Integrasi, termasuk dengan membiarkan berbagai kecurangan yang terjadi . Keberpihakan UNAMET juga ditandai dengan

---

<sup>34</sup> Ali Alat. *Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Peranannya Di Masa Mendatang*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 1998, hlm. 25.



banyaknya staf lokal yang direkrut UNAMET yang merupakan pendukung Anti-Integrasi yaitu sebanyak 95%. Tidak hanya sampai di situ, selama proses pelaksanaan referendum juga terdapat banyak keberpihakan yang dilakukan oleh UNAMET secara terang-terangan. Hampir di setiap TPS terjadi pelanggaran, banyak orang asing yang dideportasi karena memprovokasi referendum, UNIF (Pro-Integrasi) juga melaporkan 89 laporan pelanggaran selama referendum, hingga puncaknya pada 30 Agustus 1999 di seluruh Timor Timur terjadi gelombang protes kelompok Pro-Integrasi yang kecewa. Mereka menyaksikan sendiri pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh UNAMET beserta staf lokal selama pencoblosan berlangsung.<sup>35</sup>

Intervensi dari asing ini tidak hanya terbatas dari peran UNAMET, Media internasional pun tak luput dari kepentingan terselubung dalam penyampaian informasinya mengenai Timor-Timur. Mereka memanipulasi dan melebih-lebihkan kenyataan agar terlihat keburukan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan hal ini membuat citra Indonesia menjadi sangat buruk di mata dunia internasional.

Pengiriman intelijen asing tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Amerika, Australia, Selandia Baru, dan sekutunya untuk memantau dan menyadap informasi mengenai Timor-Timur. Australia memiliki motif terselubung yang kuat dibandingkan negara-negara lainnya. Dapat dibuktikan dengan surat PM Howard yang mendesak Presiden Habibie untuk segera menyelenggarakan

---

<sup>35</sup> *Tempo* 14 September 1996, hlm. 70.

referendum diikuti oleh serangkaian lobi intens. Kedua, Australia segera membuka kantor konsulat di Dili. Ketiga, kontribusi Australia yang cukup besar dalam UNAMET, hingga mencakup 60%. Kelima, alokasi 2.500 pasukan di Darwin yang sewaktu-waktu siap dimobilisasi masuk ke Timor Timur. Kelima, Australia sangat berambisi untuk memimpin Civpol UNAMET. Keenam, aktivitas intelijen Australia ASIS yang menyadap informasi komunikasi TNI dan mencuri dokumen rahasia Indonesia. Berbagai analisis muncul untuk mengetahui motif Australia yang sebenarnya.<sup>36</sup>

Australia memanfaatkan Timor-Timur sebagai daerah penyangga (buffer zone) untuk menangkal gangguan keamanan dari utara, dalam hal ini Indonesia. Bila ia menguasai Timor-Timur, segala sepak terjang Indonesia akan terpantau. Kemungkinan kedua, Timor-Timur akan dijadikan daerah pemasaran barang dan jasa Australia. Kemungkinan ketiga, Timor-Timur memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar di Celah Timor dan tentu saja hal ini menarik perhatian banyak pihak, tidak terkecuali Australia. Oleh karena itu, permasalahan dalam negeri Indonesia terkait dengan masalah separatisme di Timor-timur menjadi terinternasionalisasi karena adanya campur tangan pihak-pihak asing di dalamnya.

---

<sup>36</sup> *Ibid*,